

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adrian Sutedi. Hukum Kepailitan, cet.1. *Ghalia Indonesia*, (2009).
- Ahmad Wijaja, dan Yani. Perseroan Terbatas. *Raja Grafindo Persada*, 1999.
- “Anto. S. Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jakarta: *Kencana Prenada Media Group*. (2012)
- Atika Ismail, Analisis Alternatif Restrukturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui PKPU, Kepailitan Dan Likuidasi, *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, (2021), hlm 43–56.
- Bernard Nainggolan. Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor, dan Pihak-Pihak Berkepentingan. *Alumni*, (2011).
- Bernard Nainggolan. *Perlindungan Hukum Seimbang Kreditor, Kreditor dan Pihak-Pihak Berkepentingan Lainnya*. Alumni, 2011.
- Dewi, Briliyenti Mustika, dan Widhi Handoko. “Peran Kurator Dalam Pengawasan Going Concern Terhadap Perusahaan Pailit.” *Notarius* 16, no. 3 (2023): 1333–47. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.42463>.
- DR. Sudjanto Sudiana, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan Dan Penyelesaian Serta Akibat Hukum Penelitian*. Allsysmedia,
- Elyta Ras Ginting. *HUKUM KEPAILITAN* “Buku Kesatu” Teori Kepailitan. 1 ed. *Sinar Grafika*, 2018.
- Emmy Yuhassarie. Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya,. *Pusat Pengkajian Hukum*, 2003.
- Eryanto Nugroho, Herni Sri Nurbayanti. *Kepailitan di Negeri Pailit*. Cet. 1. Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 2003.
- Fuady, M.. Hukum Pailit dalam Teori & Praktek*. Bandung: *PT. Citra Aditya Bakti*. (2014)
- Ginting, E.R. Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan. Seri kepailitan. *Sinar Grafika*, (2018.)
- Gunawan, Widjaja. Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan. *Radja Grafindo Persada*, (2003).
- Gunawan Widjaja, Ahmad Yani. Seri Hukum Bisnis Kepailitan. *Rajagrafindo Persada*, (2000.)
- Hadi Shubban. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Kencana, t.t.

- Imran. *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Imran Nating. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. PT Raja Grafindo Perkasa, 2005.
- J. Djohansjah. *Kreditor Preferen dan Separatis*. Pusat Pengkajian Hukum, 2005.
- Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia [Bankruptcy Law In Indonesia], diterjemahkan oleh Kartini Mulyadi, cet.1, (Jakarta: Tatanusa, 2000), hal. 10. t.t.*
- M. Yahya Harahap. *Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dann Penyelesaian Sengketa*. Citra Aditya Bakti, 1987.
- Mahadi. *Falsafah Hukum : Suatu pengantar*. Alumni, 2003.
- Mantili, Rai, dan Putu Eka Trisna Dewi. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan. *Jurnal Aktual Justice* 6, no. 1 (2021): 1–19.
- Mariana Sutedi. *Hukum Acara Pengadilan Niaga*. Litbang Mahkamah Agung, Makalah Para Pakar yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Mahkamah Agung RI,
- Marjan E. Pane. *Inventarisasi dan Verifikasi dalam Rangka Pemberesan Harta Pailit dalam Pelaksanaannya*. Pusat Pengkajian Hukum, 2005.
- Martiman Prodjohamidjojo. *Proses Kepailitan*. Alumni, 2010.
- Mozes, N.Z., *Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Debitur dalam UU No.37 Tahun 2004”*, *Lex et Societatis*, 2017. Menyebut beberapa bentuk PMH yang berkaitan dengan UU Kepailitan & PKPU, khususnya pasal-41-49 UU No. 37/2004.
- Muhammad Ihsan & Tuti Widyaningrum, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Terbukanya Upaya Hukum Kasasi Atas Putusan PKPU’, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8, No. 2 (2023), hlm. 324-342.
- Munir Fuady. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*,. Cet 3. PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Munir Fuady, Hukum Pailit, hal. 194-197.*
- Paramita Prananingtyas, Ivan Harsono. Analisis Terhadap Perdamaian Dalam Pkpu Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan Pt Njonja Meneer. *Notarius* Volume 12 No. 2 (2019).
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Cetakan ke-9. PT Bina Ilmu, 2019.

- Putra, Fani Martiawan Kumara. Eksistensi Kreditor Separatis Sebagai Pemohon Dalam Perkara Kepailitan. *Perspektif* 19, no. 1 (2014): 1. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i1.606>.
- R. Anton Suyanto. Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan. Cet 1. *Kencana Prenada Media*, 2012.
- Rachmadi Usman. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Rahayu Hartini. *Hukum Kepailitan*. Cet. 2. UMM Press, 2007.
- Royana Lumban Gaol, Gindo L Tobing, and Rr Ani Wijayanti, Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Atas Debitor Pailit Dalam Perkara Kepailitan, *To-Ra Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 7.1 (2021), 104–16.
- Rudhy A. Lontoh. Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah Oleh Perpu No. 1/1998 dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Cet 1. *Alumni*, 2001.
- Santiago, F. Pengantar Hukum Bisnis. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media. (2012)*
- Santoso, Kezia. (*Analisis Putusan Nomor 42/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. No.107/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst*). 2017.
- Sastrawidjaja, Man S. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. PT. Alumni, 2006.
- Sihabudin and Eko Adhitama, Hak Kreditor Dengan Tagihan Piutang Tertolak Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang', *Arena Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 16.1 (2023), 84–105.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. PT; Intermasa, 2005.
- “Sudargo, G.(2008). Komentor Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia. Bandung: Citra Aditya. h.1-5.”
- Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan (*Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010*), hal.39.
- T.H Jackson. “Bankruptcy, Non-Bankruptcy Entitlement, and the Creditors Bargain.” *Yale Law Journal* 91 (1982): 861, 864, 866, 868.
- Wijayanta, Tata. Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga.” *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014).

JURNAL

Wijayanta, Tata. “Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga.” *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>.

Sihabudin and Eko Adhitama, ‘*Hak Kreditor Dengan Tagihan Piutang Tertolak Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*’, *Arena Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 16.1 (2023), 84–105.

“Royana Lumban Gaol, Gindo L Tobing, and Rr Ani Wijayanti, ‘*Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Atas Debitor Pailit Dalam Perkara Kepailitan*’, *To-Ra Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 7.1 (2021), 104–16.,.”

Scott Robert, T.H Jackson. “*On The Nature Of Bankruptcy : An Essay On Bankruptcy Sharing and the Creditors bargain.*” *Va Law Review* Vol 75 (1989): 185, 189–90, dan 192.

Putra, Fani Martiawan Kumara. “*Eksistensi Kreditor Separatis Sebagai Pemohon Dalam Perkara Kepailitan.*” *Perspektif* 19, no. 1 (2014): 1. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i1.606>

Paramita Prananingtyas, Ivan Harsono. “*Analisis Terhadap Perdamaian Dalam Pkpu Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan Pt Njonja Meneer.*” *Notarius* Volume 12 No. 2 (2019).

Mantili, Rai, dan Putu Eka Trisna Dewi. “*Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan.*” *Jurnal Aktual Justice* 6, no. 1 (2021): 1–19. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.618>.

Kusumaningrum, Yesi. “*Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Likuiditas Dan Leverage Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern.*” *Diponegoro Journal of Accounting* Volume 8, Nomor 4 Tahun 2019 (2019).

Atika Ismail, ‘*Analisis Alternatif Restrukturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui PKPU, Kepailitan Dan Likuidasi*’, *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 3.1 (2021), 43–56.

DISERTASI

DR. Sudjanto Sudiana, S.E., S.H., M.M.,M.H., *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan Dan Penyelesaian Serta Akibat Hukum Penelitian*

TESIS

Santoso, Kezia. (*Analisis Putusan Nomor 42/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. No.107/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst*). 2017.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata